

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN SEKOLAH KELUARGA DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh: Nini Chania

Email : chania.nini@yahoo.com

Pembimbing : Mayarni, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Limitations in knowledge, as well as differences between men and women, make women in Indonesia even more powerless. The family has a very important role in increasing development, the presence of family schools is an innovation in community education services in the form of guidance and improvement in improving the quality of the family in increasing the knowledge, skills and attitudes of parents and other family members in fostering growth in a comprehensive and integrated manner in order to achieve optimal growth and development. The purpose of this study was to determine the empowerment of women through family school activities in increasing family resilience in the City of Bukittinggi and find out supporting and inhibiting factors for women's empowerment through family school activities. The method used is qualitative methods with data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. Informants were taken using purposive sampling and snowball sampling. The result of this research is that women's empowerment through family school activities in the city of Bukittinggi has not been running optimally, based on equality, community participation, self-reliance and sustainability. The driving factor in empowerment through family school activities is support from related parties, then the inhibiting factor is the facilities and infrastructure and the community's mindset.

Keywords: Women's Empowerment, Family School Activities

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbatasan manusia dalam pengetahuan, serta adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin membuat kaum perempuan di Indonesia tidak berdaya. Seperti masyarakat matrilineal di dalam suku Minangkabau, anak perempuan di Minang memiliki peranan yang khusus. Filosofi perempuan di Minang menyebutkan Bundo Kanduang atau perkumpulan perempuan-perempuan yang paling tua pada suatu kaum yang menunjukkan posisi mulia perempuan di dalam tatanan adat masyarakatnya. Perempuan berfungsi tidak hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga terlibat dalam musyawarah di keluarga, kampung, daerah, dan nagarnya.

Munculnya pengaruh globalisasi membuat semakin luntarnya konsep adat yang mempengaruhi tatanan masyarakat. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu menciutnya peran Bundo Kanduang yang tercermin pada sedikitnya perempuan Minang yang lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh peranan dan hubungan sosial antargender yang belum setara. Ketidaksetaraan ini juga banyak dipengaruhi oleh peranan dan kesetaraan gender di tingkat keluarga.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan. Kebersinambungan antara suami dan istri dalam rumah tangga yang baik akan mampu meningkatkan ketahanan dalam keluarga itu sendiri. Mengingat pentingnya penguatan atau ketahanan keluarga, karena secara teoritis keluarga merupakan institusi utama pembangunan sumber daya manusia

karena di keluargalah aktivitas utama kehidupan seorang individu berlangsung sehingga keberfungsian, ketahanan, kesejahteraan keluarga akan menentukan kualitas individu.

Kondisi perkembangan keluarga yang ada di Sumatera Barat masih rentan terhadap perkembangan teknologi, arus wisatawan, dan rendahnya kesejahteraan ekonomi yang mengakibatkan fungsi-fungsi keluarga tidak dapat terealisasi secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh masih tingginya tingkat kerentanan ketahanan keluarga yang disebabkan oleh musuh keluarga seperti narkoba, pornografi, LGBT, HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan. Situasi yang terjadi saat ini dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, terjadi kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat dari tahun 2002-2016 secara kumulatif terdapat 1.506 kasus AIDS dan 1.831 kasus HIV positif. Sedangkan untuk di Kota Bukittinggi secara kumulatif sudah ditemukan sebanyak 177 kasus.

Dengan berbagai deskripsi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melahirkan inovasi baru yaitu Sekolah Keluarga Sejahtera Menanti (KOLEGA SEJATI) atau yang lebih dikenal sebagai Sekolah Keluarga.

Sekolah keluarga merupakan wahana pemberdayaan dan pengembangan berkelanjutan mengenai delapan fungsi keluarga (fungsi agama, fungsi sosial, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi pelestarian lingkungan, fungsi produksi, fungsi ekonomi).

Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan

potensi diri masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekolah keluarga dalam menyelenggarakan kegiatannya seperti memberikan penyuluhan, pendampingan, pembinaan berupa pendidikan keluarga, pendidikan kesetaraan, pendidikan kewirausahaan masyarakat, pendidikan kecakapan hidup, dan lainnya.

Masing-masing materi dari setiap fungsinya disosialisasikan secara berbeda pada setiap kali pertemuannya, artinya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi tidak berfokus kepada satu bidang saja namun untuk segala aspek yang menjadikan 8 fungsi keluarga sebagai tolak ukur pelaksanaan pemberdayaannya.

Sasaran dari pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga adalah jangkauan keluarga di seluruh Kota Bukittinggi yang ditujukan untuk keluarga rentan yang mengalami permasalahan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial dengan tetap melakukan sinergi bersama keluarga lainnya.

Hasil data yang di dapatkan memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan lebih banyak dari pada partisipasi laki-lakinya. Dalam program pembangunan itu sendiri, sangat pentingnya peran serta masyarakat termasuk kaum perempuan. Tanpa adanya peran masyarakat, termasuk kaum perempuan secara optimal, sangat mustahil kebutuhan peningkatan kualitas hidup dan pelestarian lingkungan dapat dicapai.

Pemberdayaan melalui kegiatan sekolah dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari kegiatan sekolah keluarga dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban

yang dipikulnya melalui kegiatan berbagi ilmu di dalam kelas.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan pemberdayaan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan bergerak untuk meningkatkan kualitas keluarga yang dibuat dalam bentuk inovasi baru yaitu sekolah keluarga dari pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang hasilnya akan dituangkan dalam penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja faktor yang pendorong dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Bukittinggi?

Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan permasalahan diatas maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah

keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Bukittinggi.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya administrasi pembangunan dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiyati, Agus asmana, & I nyoman n.suryadiputra, 2005) Adapun penjelasan terhadap prinsip-

prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesetaraan : Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
- b. Partisipasi: Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c. Keswadayaan: Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama

dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

- d. Berkelanjutan: Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Konsep Kesetaraan Gender

Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan pada perempuan serta laki-laki. Selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. Perbedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada perbedaan peran, status, posisi dan sebagainya, merupakan hasil dari relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.

Menurut Oakley, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan YME, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Itulah sebabnya, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata "*participate*",

participation yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta dalam Siti Irine Astuti Dwiningrum (2011:50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 merupakan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-matserial dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (Puspitawati, 2013).

Sedangkan menurut Chapman (2000) ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui pernyataan-pernyataan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih sebagai lokasi pada Penelitian Ini oleh peneliti adalah Kota Bukittinggi dengan lokus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB), yang merupakan pelaksana penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi.

Informan Penelitian

Peneliti menggunakan informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini diantaranya Sekretaris Dinas P3APPKB, Kepala Seksi Pengarustamaan Gender Bidang Kualitas Keluarga Kota Bukittinggi dan Peserta yang mengikuti kegiatan sekolah keluarga.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber datanya adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga di Kota Bukittinggi.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan.

1. Buku Panduan Pelaksanaan Sekolah Keluarga
2. Data Story Telling tahun 2018 dan 2019
3. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga

- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia
 - c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
4. Disertasi, skripsi, dan artikel seputar masalah penelitian
 5. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Observasi

Observasi adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penulis melakukan observasi lapangan,

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data, menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan ketika data dari informan ataupun sumber lainnya telah didapatkan. Dalam membahas tentang analisis data, **Huberman dan Miles** dalam **Usman (2014)** mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi

1. Kesetaraan

Kesetaraan disini adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan kegiatan maupun antara laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa lembaga yang melakukan kegiatan sebagai pendamping atau pelaksana kegiatan tidak hanya memosisikan dirinya sebagai guru atau pembina saja. Namun disini lain, masyarakat terlibat penuh dalam bersuara dan memberikan pendapat mereka mengenai hal-hal yang mereka tahu dan mereka butuhkan tentang ketahanan keluarga atau dengan kata lain adanya proses saling tukar-menukar pengetahuan.

Dalam kegiatan sekolah keluarga ini keterlibatan perempuan lebih banyak dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta perempuan, sedangkan pemberdayaan untuk keduanya (laki-laki dan perempuan) harus seimbang. Hal ini penting karena dengan pemahaman peran-

peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat melalui peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal akan mendorong keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dan kontrol dalam berbagai kehidupan.

2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah keluarga ini sangat besar. karena dilihat dari banyak kaum perempuan terutama ibu-ibu yang antusias mendaftar, sebagaimana data yang di dapatkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah peserta. Pada tahun 2018 peserta yang mengikuti kegiatan sekolah keluarga sebanyak 75 orang dari 3 kelurahan, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 360 orang dari 12 kelurahan.

Peningkatan partisipasi kegiatan sekolah keluarga ini terjadi didasari atas bertambahnya jumlah kelurahan yang diikutsertakan setiap tahunnya. Kegiatan sekolah keluarga disosialisasikan di setiap kelurahan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti tim penggerak penyelenggaraan kesejahteraan keluarga (TP PKK) tingkat kelurahan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APPKB) dan apartur terkait lainnya.

3. Keswadayaan dan Kemandirian

Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat setelah mengikuti kegiatan sekolah keluarga ini, peserta mampu mengevaluasi dan melanjutkan kemampuan dan pengalaman baru yang mereka dapatkan dalam mengikuti sekolah keluarga di keluarga dan lingkungannya. Karena permasalahan yang timbul dilingkungan sosial masyarakat berawal dari keluarga, dengan memulai dari keluarga merupakan langkah strategis

untuk mewujudkan masyarakat bernilai, karena aktualisasi proses pendidikan pertama kali terjadi didalam keluarga. Akan tetapi kemandirian ini belum tampak secara signifikan disebabkan oleh sifat manusia yang belum mampu menerapkan arahan yang diberikan melalui kegiatan sekolah keluarga secara menyeluruh, sebab merubah karakter atau tata cara fikir manusia itu mempunyai tahap-tahapnya dan itu belum tentu dapat diubah secara keseluruhan.

4. Keberlanjutan

Dilihat dari segi keberlanjutan kegiatan ini masih berlangsung dan terlaksana dari awal kegiatan diadakan hingga pada saat ini, hal tersebut berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kegiatan ini sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi dari peserta yang mengikuti kegiatan ini maka semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan dari kegiatan sekolah keluarga.

Pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga ini dilihat dari segi pengaplikasiannya belum terlihat secara signifikan karena masyarakat banyak mengalami kendala-kendala yang berbeda, seperti masyarakat yang tidak bisa menerapkan pembinaan dan penyuluhan secara maksimal yang diakibatkan kurangnya lahan atau wadah bagi mereka untuk dapat mengaplikasikan inovasi mereka setelah mengikuti pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Namun pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga ini sudah tepat sasaran.

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Sekolah Keluarga

a. Faktor Pendorong

Dukungan dari pihak dan komitmen untuk sama-sama mensukseskan kegiatan sekolah keluarga akan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat. Karena pemecahan masalah di keluarga sangat kompleks, semua element harus bersama-sama turun tangan berupaya menyelesaikannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sifat gotong royong ini menjadi dukungan besar bagi pelaksanaan kegiatan sekolah keluarga untuk dapat berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, hal ini juga dapat dilihat dari adanya banyak narasumber yang terlibat dalam membuat kegiatan ini bertahan dan dilaksanakan melalui banyak partisipasi dan sukarelawan dari banyak pihak instansi, baik itu instansi pemerintah, pihak swasta maupun organisasi masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1. Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan dan pembagian kerja antara semua pihak instansi terkait menjadikan sarana dan parasarana hanya memanfaatkan fasilitas yang ada disetiap kelurahan atau tempat lain yang letaknya tidak jauh dari domisili peserta kegiatan sekolah keluarga. Pemanfaatan ruangan kosong yang ada disetiap kelurahan menjadikan ruangan untuk melaksanakan kegiatan harus membagi waktu ataupun ruangan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya yang sama-sama memanfaatkan ruangan kosong yang ada di kelurahan tersebut. Pembagian ruangan ini menjadi penghambat seperti pelaksanaan kegiatan yang berbeda dilakukan di waktu yang bersamaan diruangan menjadikan

penyelenggara kegiatan mengubah tempat ataupun waktu pelaksanaannya.

2. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang masih tradisional, karena pola pikir masyarakat dalam mengikuti kegiatan sekolah keluarga yang sifatnya hanya ikut-ikutan tanpa mempunyai maksud tersendiri dan menganggap pemberdayaan yang dilakukan mengenai keluarga melalui kegiatan sekolah keluarga ini tidak akan ada perubahan yang besar. Karena perubahan sikap seseorang yang ingin menjadi manusia yang lebih baik itu tergantung kepada kemauan mereka sendiri. Kemauan inilah yang menjadi dasar pemikiran masyarakat yang masih kurang luas akan pentingnya pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga di Kota Bukittinggi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat kemandirian dari masyarakatnya sendiri yang masih tidak mau untuk melaporkan masalah mereka kepada pihak yang berwenang karena masih adanya rasa malu dan menganggap masalah mereka masih bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Selain itu dari keberlanjutan, sudah adanya pendampingan yang diberikan oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi namun diakhir dari pelaksanaann pemberdayaan dilihat dari segi pengaplikasiannya belum terlihat secara signifikan karena adanya kendala dari masyarakat yang tidak bisa menerapkan pemberdayaan melalui kegiatan sekolah keluarga diakibatkan oleh kurangnya wadah

yang dimiliki masyarakat, kemudian masyarakat yang masih lemah dalam menggunakan teknologi.

2. Faktor pendorong pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga, yaitu dukungan dari semua pihak terkait dan komitmen untuk sama-sama mensukseskan kegiatan sekolah keluarga. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah keluarga, yaitu: sarana dan prasarana kemudian pola pikir dari masyarakat.

Saran

1. Penyelenggara kegiatan sekolah keluarga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan secara konsisten dan optimal dalam pelaksanaannya, seperti memperhatikan dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan dari masyarakat untuk dapat menerapkan pendidikan masyarakat yang diberikan melalui kegiatan sekolah keluarga ini.

2. Masyarakat diharapkan dapat memperluas kemampuan dan cara berfikir mereka bahwa edukasi yang berhubungan mengenai keluarga itu sangat penting sebab kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Najiyati, Sri. S., Agus Asmana, dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Widjaja, HAW. 2003:169 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anan Sutisna. 2012. *Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat*.
- Leila Mona Ganiem. 2017. *Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Pendidikan*. Universitas Mercu Buana Jakarta
- Nadia Kharima. 2008. *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui Gender Mainstreaming (studi kasus workshop pemberdayaan mubalighat I oleh pusat studi wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Widya Safutry. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penguatan Keluarga Oleh Yayasan Sos Children's Village Medan di Lingkungan III Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan*.
- Widta Riski Indriani. 2015. *Pemberdayaan Kaum Perempuan pada Sekolah Perempuan Pedesaan di Dusun Sukorembug Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Baru*. Universitas Sunan Ampel Surabaya